

a) Konversi terjadi akibat dari berbagai faktor.

Menurut Ilham, *et al* (2001) faktor yang mempengaruhi konversi lahan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor ekonomi keuntungan yang akan didapat dalam menjual lahan lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankan lahan pertaniannya. Dapat pula, lokasi lahan tersebut berada di kawasan industri sehingga harga lahan tinggi, pajak lahan yang tinggi mengakibatkan petani mengkonversi lahannya.

b) Faktor Sosial

Menurut Witjaksono dalam Ilham, *et al* (2001) ada lima faktor sosial yang mempengaruhi alih fungsi lahan, yaitu: perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan, pemecahan lahan, pengambilan keputusan, dan apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

c) Peraturan pertanahan yang ada

Namun masih ada celah bagi pengejar rente untuk melakukan negosiasi dan lobi dengan memanfaatkan peraturan. Dalam peraturan tersebut penggunaan tanah sawah beririgasi masih dapat dilakukan asalkan sedikit mungkin dan dalam keadaan terpaksa. Dua keadaan ini sifatnya sangat relatif, sehingga berpotensi untuk memicu terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis ke non pertanian. Di samping itu tidak ada kejelasan ganjaran atau sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar aturan yang ada tersebut. Dengan demikian hasil analisis sesuai dengan pendapat Irawan et al. (2000), yang menyatakan alih fungsi lahan subur, seperti lahan sawah beririgasi terus berkembang seperti tanpa kendali. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang ada kurang efektif karena tidak dilengkapi sistem pemberian sanksi bagi pelanggar dan system penghargaan atau insentif bagi yang patuh.

Dampak Konversi Lahan

Secara umum dampak negatif konversi lahan dapat diuraikan menjadi tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kuantitas Ketersediaan Pangan

Sebenarnya aspek ini dapat dipenuhi melalui produksi domestik atau melalui impor. Namun, hal ini terlalu beresiko tinggi bagi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar karena pasokan bahan pangan dunia yang cukup tipis terutama untuk bahan pangan sereal juga akan menguras cadangan devisa cadangan devisa negara. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada pilihan bagi Indonesia untuk memproduksi bahan pangan secara mandiri. Melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Secara nasional sumberdaya lahan sawah memiliki peranan penting dalam produksi bahan pangan sekitar 90% produksi padi nasional dari lahan sawah sisanya dari lahan kering.

Dampak konversi lahan sawah terhadap produksi Beras di Jawa tertera pada Tabel 1. Dari tabel tersebut menunjukkan konversi lahan sawah di Jawa selama kurun waktu 18 tahun (1981-1998) diperkirakan secara akumulasi telah menyebabkan hilangnya setara 50,9 juta ton gabah atau sekitar 2,82 juta ton gabah per tahun. Bila dihitung setara beras, maka kehilangan produksi pangan tersebut adalah sebesar 1,7 juta ton beras per tahun. Jumlah kehilangan produksi beras tersebut hampir sebanding dengan jumlah impor beras pada tahun 1984-1997 yang berkisar antara 1,5 juta hingga 2,5 juta ton beras per tahun. Artinya, apabila konversi lahan sawah dapat ditekan maka hal itu akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pengadaan beras Nasional. Upaya pengendalian konversi lahan sawah tersebut menjadi cukup mendesak mengingat pertumbuhan produksi Beras akhir-akhir ini mengalami stagnasi akibat terkendala oleh kejemuhan teknologi.

Tabel 2 . Produksi yang Hilang Akibat Terjadinya Konversi di Jawa, Menrut Periode dan Propinsi (1981-1998)(ton)

No	Kabupaten	Pelita				Total
		III	IV	V	VI	
1	Jawa Barat	(261,300)	(2,452,141)	(4,299,862)	(3,800,547)	(10,831,851)
		20,29	20,95	23,07	19,67	21,22
2	Jawa Tengah	(473,194)	(2,767,178)	(6,175,292)	(6,491,291)	(15,906,955)
		36,75	23,64	33,13	33,59	31,22
3	DIY	(66,146)	(469,832)	(563,933)	(638,035)	(1,727,946)
		5,14	4,01	3,03	3,25	3,39

4	Jawa TImur	(486,920)	(6,016,935)	(7,598,010)	(8,406,183)	(22,508,047)
		37,82	51,40	40,77	43,50	44,17
	Jawa	(1,287,569)	(11,706,115)	(18,637,140)	(19,326,098)	(50,956,922)
	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Data Survey Pertanian. BPS. 1978-1998

2. Apek Stabilitas Ketersediaan Pangan

Ketersedian dalam kuantitas yang sesuai kebutuhan secara nasional merupakan syarat keharusan untuk menciptakan ketahanan pangan. Namun kondisi tersebut belum memenuhi syarat kecukupan apabila tidak diikuti dengan distribusi pangan yang merata menurut tempat dan waktu sehingga dapat diakses konsumen setiap saat (Simatupang, 1999). Indonesia memiliki dua musim yaitu musim hujan dan kemarau, pada musim kemarau sebagian produksi beras dihasilkan pada sawah irigasi yang memiliki pasokan air yang lebih terjamin. Sehingga lahan pertanian irigasi lebih berpengaruh terhadap stabilitas produksi secara nasional. Jikalau terdapat konversi lahan pada sawah irigasi maka akan terjadi disstabilitas terhadap prouksi beras secara nasional.

3. Aspek Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Bahan Pangan

Hal ini dapat dibedakan atas, aksesibilitas fisik dan ekonomi. aksesibilitas fisik sangat dipengaruhi oleh sistem distribusi pangan sedangkan aksesibilitas ekonomi sangat dipengaruhi daya beli pangan rumah tangga. Pada tingkat harga yang sama, rumah tangga yang berpendapatan rendah memiliki aksesibilitas ekonomi yang rendah dibanding berpendapatan yang tinggi. Pada umumnya kelompok berpendapatan rendah tersebut bermata pencaharian sebagai buruh tani. Jika terjadi konversi lahan terutama lahan sawah yang beririgasi dengan daya serap tenaga kerja yang tinggi maka akan terjadi penurunan kesempatan kerja buruh tani selanjutnya terdapat penurunan pendapatan buruh tani. Berdasarkan hal tersebut, maka konversi lahan pertanian secara langsung akan mengurangi aksesibilatas ekonomi buruh tani terhadapa bahan pangan. Disamping itu daya beli pangan kelompok masyarakat lainnya juga akan berkurang akibat naiknya haraga pangan yang dirangsang oleh penurunan produksi akibat konversi lahan.

SINTESIS

Perlu digarisbawahi bahwa penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian boleh dikatakan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Mengingat nilai keberadaan lahan pertanian bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukan pengendaliannya harus memperhitungkan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal tersebut mengingat lahan yang ada mempunyai nilai yang berbeda, baik ditinjau dari segi jasa (*service*) yang dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat di dalamnya. Sehubungan dengan isu di atas, Pearce and Turner (1990) merekomendasikan tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan sawah, yaitu melalui : (1) *regulation*; (2) *acquisition and management*; dan (3) *incentive and charge*. Uraian singkat dari ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Regulasi: Melalui pendekatan ini pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada. Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, pengambil kebijakan bisa melakukan pewilayahan (*zoning*) terhadap lahan yang ada serta kemungkinan bagi proses alih fungsi. Selain itu, perlu mekanisme perizinan yang jelas dan transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses alih fungsi lahan.
2. Manajemen dan Akuisisi: Melalui pendekatan ini pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan yang ada guna mendukung upaya ke arah mempertahankan keberadaan lahan pertanian.
3. *Incentive and Charges*: Pemberian subsidi kepada para petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian, merupakan bentuk pendekatan lain yang disarankan dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pengembangan prasarana yang ada lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian berikut usaha ikutannya. Mengingat selama ini penerapan perundang-undangan dan peraturan

pengendalian alih fungsi lahan kurang berjalan efektif serta berpijak pada acuan pendekatan pengendalian sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu diwujudkan suatu kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecahkan kebuntuan pengendalian alih fungsi lahan sebelumnya.

Adapun komponennya antara lain instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat. Instrumen hukum meliputi penerapan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan. Sementara itu, instrumen ekonomi mencakup insentif, disinsentif, dan kompensasi. Kebijakan pemberian insentif diberikan kepada pihak-pihak yang mempertahankan lahan dari alih fungsi. Pola pemberian insentif ini antara lain dalam bentuk keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta kemudahan sarana produksi pertanian.

Sebaliknya, disinsentif diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan yang implementasinya berlawanan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, kompensasi ditujukan untuk pihak-pihak yang dirugikan akibat alih fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan, atau yang mencegah terjadinya alih fungsi demi kelestarian lahan sebagai sumber produksi pertanian (pangan). Dengan kata lain, penerapan instrumen-instrumen tersebut berkaitan dengan pemberian penghargaan dan sanksi pelanggaran (*reward and punishment*). Kebijakan zonasi berhubungan dengan ketatalaksanaan tata ruang wilayah melalui pengelompokan (*cluster*) lahan menjadi tiga kategori zona pengendalian, yaitu lahan yang dilindungi (tidak boleh dialihfungsikan), alih fungsi terbatas, dan boleh dialihfungsikan. Zonasi diatur berdasarkan criteria klasifikasi irigasi, intensitas tanam, dan produktivitas lahan sawah. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan/Abadi sudah sangat mendesak untuk diberlakukan.

Dari beberapa hasil penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dapat diungkapkan bahwa salah satu fenomena alih fungsi lahan hal yang patut diwaspadai adalah yang sifatnya sporadis dan berdimensi individu untuk berbagai keperluan seperti perumahan dan fasilitas lainnya. Pola alih fungsi lahan semacam ini sulit dikontrol, sehingga pendekatan yang dianggap paling tepat untuk

menanganinya adalah dengan melibatkan masyarakat melalui inisiatif dan aksi kolektif (Bappenas dan PSE-KP, 2006). Pelibatan masyarakat seyogyanya tidak hanya terpaut pada fenomena di atas, namun mencakup segenap lapisan pemangku kepentingan.

Pengembangan Pertanian Di Luar Jawa

Tabel 3. Ancaman Konversi Lahan

Provinsi/ Pulau	Luas lahan sawah			RTRW Lahan Sawah *)	
	Total	Non Irigasi	Irigasi	Dikonversi	Diperha- hankan
- ha -					
Sumatera	2,036,690	414,780	1,621,910	710,230	911,680
Jawa & Bali	3,933,370	442,120	3,391,250	1,669,600	1,721,650
Kalimantan	1,253,130	375,200	877,930	58,360	819,570
Sulawesi	982,410	124,270	858,140	414,290	443,850
NTT, NTB, Maluku, Malut	566,100	67,050	499,050	180,080	318,990
Papua & IJB	131,520	65,060	66,460	66,460	-
Total	8,903,220	1,488,480	7,314,740	3,099,020	4,215,740

Sumber : BPN (2004)

*) Sebagian telah disetujui oleh DPRD masing-masing

Berdasarkan data diatas, menggambarkan bahwa pulau jawa tidak bisa terhindar dari konversi lahan. Maka dari itu, diperlukan perluasan sektor pertanian ke luar Jawa untuk menghindari ancaman terhadap ketahanan pangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ketahanan lahan pertanian merupakan suatu aspek yang harus dilihat secara menyeluruh. Perkembangan konversi lahan sawah terjadi secara akselaratif, bahkan itu terjadi pada lahan irigasi yang merupakan jenis lahan pertanian yang sangat produktif untuk produktifitas beras secara nasional. Antisipasi untuk mengendalikan konversi lahan sawah memang sulit untuk dilakukan, walaupun telah dilakukan pencetakan lahan sawah baru dan adanya perbaikan kualitas irigasi yang berdampak juga pada peningkatan luas lahan secara agregat. Akan tetapi, kualitas lahan sawah yang baru dicetak lebih rendah dibandingkan lahan sawah yang sudah mapan.

Mengingat bahwa di masa mendatang peluang untuk memperluas areal panen semakin terbatas, maka konversi lahan sawah untuk jangka panjang sangat berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung hal itu bersumber dari degradasi luas panen, secara tidak langsung disebabkan menurunnya produktivitas hamparan lahan sawah di sekitarnya.

Penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian boleh dikatakan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Mengingat nilai keberadaan lahan pertanian bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukan pengendaliannya harus memperhitungkan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal tersebut mengingat lahan yang ada mempunyai nilai yang berbeda, baik ditinjau dari segi jasa (*service*) yang dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat di dalamnya. Terdapat tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan sawah, yaitu melalui : (1) *regulation*; (2) *acquisition and management*; dan (3) *incentive and charge*.

Saran

Konversi lahan tidak boleh dibiarkan secara terbuka mesti ada aturan yang mengatur kondisi ini. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Mengingat nilai keberadaan lahan pertanian bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukan pengendaliannya harus memperhitungkan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal tersebut mengingat lahan yang ada mempunyai nilai yang berbeda, baik ditinjau dari segi jasa yang dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat di dalamnya. Alternatif solusi pengendalian laju konversi lahan pertanian dapat ditempuh melalui dua strategi, yaitu: Strategi Peraturan Kebijakan dan Strategi Partisipasi Masyarakat. Dari segi kebijakan, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan/Abadi sudah sangat mendesak untuk diberlakukan.

Dalam pengendalian konversi lahan sawah disamping pendekatan *regulation* yang selama ini sudah berjalan, perlu didukung oleh peraturan lainnya, pengawasan dan penerapan sangsi yang adil. Disamping itu pendekatan ekonomi seperti melalui kompensasi, dan pajak adalah perlu dipertimbangkan.

Upaya pengendalian dan pencegahan konversi lahan sawah hendaknya dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinir antara berbagai pihak/instansi yang terkait dengan kegiatan pembangunan. Misalnya Departemen Pertanian, Badan Pertahanan Nasional memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan misi pengendalian konversi. Selama ini masing-masing instansi tersebut hanya mempertimbangkan kepentingan sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Konversi Tak Terkendali*. *Kompas*, 28 April 2008.
- Ilham, Nyak, dkk. *Perkembangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian IPB Bogor.
- Iqbal, M. dan Sumaryanto. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Irawan, B. 2005. *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 23. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Irawan, B. dan S. Friyatno. 2002. *Dampak Konversi Lahan Sawah di Jawa Terhadap Produksi Beras dan Kebijakan Pengendaliannya*. Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis SOCA: Vol.2 No.2 : 79 – 95. Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Denpasar.
- Kohnke, Helmut. 1959. *Soil Conservation*. New York: McGraw Book Company.
- Prabowo, Hirmas E. 2008. *Tinggalkan Pendekatan Komoditas*. *Kompas*, 24 April 2008.
- Priyarsono, D.S., dkk. 2007. *Ekonomi Regional*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suhandi, Ahmad. 1990. *Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri(daerah Jawa Barat)*. Bandung: Depdikbud.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	:	Nanang Sumbara
Nama Panggilan	:	Nanang
TTL	:	Rembang, 12 Juli 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Anak ke	:	4 dari 4 Bersaudara
Status	:	Belum Menikah
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Universitas / Jurusan	:	IPB/Agribisnis
Hp	:	0856 41 751 606
E-mail	:	heavy_coolz@yahoo.co.id
Alamat kost	:	Kp. Leuwikopo no 34 Darmaga Bogor
Alamat asal	:	Pamotan RT03 RW07 Pamotan Rembang Jawa Tengah

Riwayat pendidikan :

- TKN 4 Pamotan (1993-1994)
- SDN 7 Pamotan (1994-2000)
- SLTPN 1 Pamotan (2000-2003)
- SMAN 1 Rembang (2003-2006)
- IPB, Departemen Agribisnis, Bogor (2006-sekarang)

Pengalaman Organisasi:

- Anggota HKRB (Himpunan Keluarga Rembang di Bogor)
- Anggota HIPMA Departemen Agribisnis IPB (2008-sekarang)
- Sie Apresiasi Seni OSIS SMA N 1 Rembang (2003-2004)
- Sie Kepribadian dan Berbudi Luhur SMAN 1 Rembang (2004-2005)
- Wakil Ketua OSIS SMP N Rembang (2001-2002)

Prestasi

- **Juara I Ketrampilan B.Inggris Tingkat SMP Se-Kabupaten**
- **Masuk USMI IPB**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Achmad F. Romadhona
TTL : Serang, 21 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Anak ke : 2 dari 4 Bersaudara
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Universitas / Jurusan : IPB/Agribisnis
Hp : 0856 915 22 731
E-mail : firdiansyah_roma@yahoo.com
Alamat kost : Asrama Mahasiswa Banten, BBS Darmaga Bogor
Alamat asal : Jln Lingkar Selatan Komp. BMI Blok A4 No.3 Serang
Banten

Riwayat pendidikan :

- TK Muhammadiyah (1993-1994)
 - SDN 7 Serang (1994-2000)
 - SLTPN 1 Serang (2000-2003)
 - SMAN 1 Serang (2003-2006)
 - IPB, Departemen Agribisnis, Bogor (2006-sekarang)

Pengalaman Organisasi:

- Keta KMB-IPB (Himpunan Keluarga Banten di IPB)
 - Anggota HIPMA Departemen Agribisnis IPB (2008-sekarang)
 - Staff Informasi dan Komunikasi BEM FEM (2007-2008)
 - Pengurus KOPMA IPB (2007- Sekarang)

Prestasi

- Finalist LKTM UNDIP 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	:	Febriandini Harvina Suci
TTL	:	Kisaran, 16 Februari 1990
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Anak ke	:	2 dari 4 Bersaudara
Status	:	Belum Menikah
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Universitas / Jurusan	:	IPB/Agribisnis
Hp	:	0852 758 509 00
E-mail	:	uczie_aqua16@yahoo.com
Alamat kost	:	Kost puteri Windy Jl.Balumbang jaya, Balebak
Alamat asal	:	Komplek PT BSP Jl.Ir. H. Djuanda bungalow 17, Kisaran. Sumatera Utara

Riwayat pendidikan :

- TK Pertiwi (1994-1994)
- SDN 23 Bukit Tinggi (1995-2001)
- SMP Diniyyah Puteri Padang Panjang (2001-2004)
- SMA Diponegoro (2004-2007)
- IPB, Departemen Agribisnis, Bogor (2007-sekarang)

Pengalaman Organisasi:

- IMMAM-IPB (Ikatan Mahasiswa Muslim Asal Medan)
- Anggota HIPMA Departemen Agribisnis IPB (2008-sekarang)

Prestasi :

Diterima sebagai mahasiswa IPB